
IMPLEMENTASI PROGRAM BAPAK ASUH ANAK STUNTING (BAAS) DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SUMEDANG

Fitri Handayani Sumarta

Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Mei 8, 2025

Revised Mei 30, 2025

Accepted Juni 18, 2025

Keywords:

Public policy

Stunting

Implementing the BAAS program

Accelerating stunting decline

ABSTRACT

The Stunting Children's Fair Program (BAAS) is a mutual cooperation movement to help reduce stunting, which is the problem of malnutrition in children, which was initiated by the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) which aims to help reduce stunting, which is the problem of malnutrition in children. This study aims to determine the extent of the implementation of the Stunting Children's Father's Program (BAAS) in an effort to accelerate the decline in stunting in Sumedang Regency has been implemented. The research method used in research is qualitative research methods. The sampling technique used is purposive sampling. The informant in this study was the Head of the Family Planning Division, the Head of the Prosperous Family Division, UPTD Dalduk, Ganeas District, UPTD Dalduk, Tanjungmedar District. Data collection techniques used are literature studies and field studies consisting of observations, interviews, documentation, and triangulation. While the data processing procedures in this study are data collection, data reduction, data presentation, and draw conclusions. Based on the results of the study, the data was made, it was concluded that the implementation of the Stunting Children's Fault Father's program (BAAS) in an effort to accelerate the decline in stunting in Sumedang Regency had been carried out quite well but there were several shortcomings. This can be seen from several factors such as the lack of responsibility from the community, there is no change from the behavior of the community, the management is not optimal, the lack of nutritional resources, and for reporting there are still late reporting. Based on the results of the study there are several suggestions including, collaboration between the government is needed, and the private sector by raising additional funds for the adequacy of the BAAS program, it is necessary to increase incentives and sanctions to the implementers, and follow -up for the long term of the BAAS program to create positive social changes.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Fitri Handayani Sumarta

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Email: fitrihandayanisumarta@gmail.com

1. INTRODUCTION

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai dari janin masih di dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Stunting disebabkan oleh masalah asupan gizi yang dikonsumsi selama kandungan maupun masa kehamilan, serta masa nifas, terbatasnya layanan Kesehatan dan rendahnya akses makanan bergizi, rendahnya akses sanitasi dan air bersih juga merupakan penyebab stunting. Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menjelaskan bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan mengakibatkan kematian. Balita yang mengalami masalah gizi stunting memiliki risiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko penyakit lainnya di masa mendatang.

Angka Prevalensi stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting tertinggi di Asia Tenggara. Stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pola asuh, pendidikan, akses terhadap air bersih, dan layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, intervensi untuk mencegah stunting harus dilakukan secara holistik dan melibatkan berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang menghadapi tantangan sama. Dengan penduduk yang beragam dan sejumlah masyarakat yang masih tinggal di daerah pedesaan, isu stunting di Kabupaten Sumedang perlu ditangani dengan segera. Berdasarkan data tiga tahun terakhir, prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang mencapai angka yang mengkhawatirkan, yang menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis untuk percepatan penurunan stunting di daerah ini. Berikut merupakan kasus tertinggi angka stunting di Kabupaten Sumedang:

Tabel 1. Data Anak Stunting Di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	Jumlah Balita Stunting			Proporsi Balita Stunting 3 Tahun Terakhir
		2021	2022	2023	
1	Jatinangor	950	563	660	34,13%
2	Cimanggung	492	290	315	16,59%
3	Tanjungsari	562	586	540	28,13%
4	Sukasari	216	157	161	25,02%
5	Pamulihan	375	428	406	26,05%
6	Rancakalong	453	276	219	34,42%
7	Sumedang Selatan	436	526	408	27,44%
8	Sumedang Utara	674	591	480	30,09%
9	Ganeas	223	192	187	36,62%
10	Situraja	232	166	181	24,97%
11	Cisitu	130	40	66	16,81%
12	Darmaraja	77	70	58	9,59%
13	Cibugel	360	275	158	46,31%
14	Wado	531	187	112	30,19%
15	Jatinunggal	599	259	280	40,68%
16	Jatigede	293	205	122	46,54%
17	Tomo	36	46	57	9,6%
18	Ujungjaya	180	197	193	31,51%
19	Conggeang	96	92	101	16,93%
20	Paseh	46	80	118	10,05%
21	Cimalaka	444	379	309	28,64%
22	Cisarua	1	0	80	6,56%
23	Tanjungkerta	278	273	194	35,77%
24	Tanjungmedar	297	255	221	44,43%
25	Buahdua	63	78	85	13,48%
26	Surian	102	105	80	41,72%

Dalam penyajian data stunting, pemerintah Kabupaten Sumedang telah melakukan inovasi melalui aplikasi Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi (eSimpati) yaitu, sebuah aplikasi untuk mencatat dan melaporkan data stunting di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data Eppgbm/eSimpati di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa angka stunting di Kabupaten Sumedang masih tinggi dengan jumlah balita stunting Tahun 2021 sebanyak 8.092, Tahun 2022 sebanyak 6.316 dan Tahun 2023 sebanyak 5.791. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, komunitas, dan masyarakat luas. Program-program pendidikan dan penyuluhan mengenai gizi seimbang harus ditingkatkan, terutama dikalangan ibu hamil dan untuk orangtua, agar memberikan makanan bergizi bagi pertumbuhan anak. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas harus dibatasi, terutama di daerah-daerah yang terpencil.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting memberikan kepercayaan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksana tim percepatan penurunan stunting di tingkat pusat. Kemudian BKKBN berkolaborasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk sebuah program yang bertujuan untuk percepatan penurunan stunting. Formulasi program yang dituangkan di dalam peraturan presiden tersebut berbasis keluarga berisiko stunting dengan penekanan pada penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan peningkatan akses air minum serta sanitasi.

Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) merupakan rancangan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah lokal, masyarakat, dan sektor swasta, dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terkait stunting, memberikan pemenuhan asupan gizi serta memotivasi tindakan nyata untuk mengurangi stunting. Pasal (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menjelaskan maksud dari elemen bangsa adalah pemangku kepentingan yang terdiri dari orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media masa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan stunting. Program ini mengedepankan pendekatan kolaboratif dan partisipatif, yang diharapkan dapat mempercepat upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Sumedang secara efektif.

Tujuan umum Implementasi Program BAAS adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program penyelenggaraan BAAS dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumedang serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya dalam mengatasi faktor penghambat dalam implementasi program BAAS, juga mewujudkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak yang sehat.

BAAS ini sebagai gerakan gotong royong atau kepedulian terhadap keluarga resiko stunting yang diharapkan mampu mencegah bertambahnya jumlah kasus stunting terutama di Kabupaten Sumedang, melalui bantuan pemenuhan gizi dan nutrisi bagi anak dari keluarga berisiko stunting kategori kurang mampu. Sesuai dengan data dari pegawai staf bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan menjelaskan bahwa BAAS memberikan bantuan kepada masyarakat yang berisiko stunting berupa bantuan protein hewani seperti telur dan ayam. Anggaran untuk bantuan tersebut berasal dari swadaya atau forum Ikatan Penulis keluarga Berencana (IPKB) yang disalurkan kepada masyarakat, jadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak menyediakan anggaran yang besar terkecuali ada bantuan dari provinsi. Berikut merupakan data penerima bantuan program BAAS di Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2024:

Tabel 1. Data Laporan Pemantauan Pertumbuhan BAAS di Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2024

Nama Desa	Hasil Pemantauan Jumlah Anak Penerima Bantuan Program BAAS	
	2023	2024
Desa Raharja	10	10
Desa Sukamulya	7	-
Desa Gunasari	-	10

Sumber: Laporan Pemantauan Pertumbuhan BAAS di Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2024

Berdasarkan data Laporan Pemantauan Pertumbuhan BAAS di Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2024 yang menerima bantuan Program BAAS hanya diberikan kepada beberapa desa ditiap kecamatannya yaitu, Desa Raharja Tahun 2023 berjumlah 10 orang baduta dan balita, Desa Sukamulya Tahun 2023 berjumlah 7 orang ibu hamil dan baduta, serta Desa Gunasari dan Desa Raharja Tahun 2024 berjumlah 10 orang baduta.

Namun berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa indikasi permasalahan terkait Implementasi Program Bapak Asuh Anak Stunting di Kabupaten Sumedang. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya anggaran dari pemerintah untuk program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Hal ini bisa dilihat dari tidak meratanya pemberian program bantuan yang diberikan, dimana dalam satu tahun hanya beberapa desa yang menerima bantuan Program BAAS ini. Sehingga banyak anak yang berisiko mengalami stunting di daerah lain tidak mendapatkan perhatian dan bantuan yang diperlukan dikarenakan pelebaran cakupan program sangat terbatas.
2. Kendala dari kelompok sasaran pelaksanaan. Hal ini bisa dilihat di beberapa daerah yang terdapat kendala kultural dan sosial yang menyebabkan masyarakat enggan berpartisipasi atau menerima program-program pemerintah. Seperti pandangan tradisional tentang pola asuh dan gizi anak yang berbeda dengan rekomendasi program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
3. Kurangnya komunikasi yang intens. Hal ini bisa dilihat dari lemahnya koordinasi antar pihak seperti pemerintah, lembaga swasta, dan komunitas. Sehingga berdampak pada ketidakselarasan dalam pelaksanaan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Akibatnya, percepatan penurunan stunting menjadi terhambat.

2. METHOD

Rancangan penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui proses-proses yang akan dilakukan penulis agar mendapatkan hasil dari sebuah kegiatan penelitian. Penulis menggunakan rancangan penelitian dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2022: 85) *Purposive sampling* adalah “Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi, serta paling tahu apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang sedang diteliti. Sehingga Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dituangkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Subjek Penelitian

No	Unsur	Jumlah (orang)
1.	Kepala Bidang Keluarga Berencana	1
2.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera	1
3.	UPTD Dalduk Kecamatan Ganeas	1
4.	UPTD Dalduk Kecamatan Tanjungmedar	1
	Jumlah	4

Untuk pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan teknik pengumpulan data penelitian adalah untuk mendapatkan data. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2022: 219) sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis beragam literatur baik itu buku-buku ilmiah, dokumen, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi lapangan, yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian, diantaranya melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam melakukan uji keabsahan pada tiap tahap sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas
2. Uji Transferabilitas
3. Uji Depenabilitas
4. Uji Konfirmabilitas

3. RESULTS AND DISCUSSION

Implementasi kebijakan adalah proses penerapan atau pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk menunjukkan jawaban pada implementasi program dilakukan pengukuran melalui implementasi program menurut Donal Van Metter dan Carl Van Horn. Adapun ukuran faktor yang menentukan implementasi program menurut Donal Van Metter dan Carl Van Horn (Leo Agustino, 2017: 133-136) sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber daya

3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan keseluruhan dari Implementasi Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sumedang, sebagai berikut:

Tabel 4. Kesimpulan dalam Implementasi Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sumedang

No.	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1.	1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan	a. Kejelasan Ukuran Program	Kejelasan ukuran program dalam Implementasi program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) sudah dilaksanakan, namun capaian targetnya belum tercapai dilihat dari partisipasinya. Selain itu untuk kejelasan tujuan program BAAS ialah untuk menurunkan angka stunting pada keluarga beresiko stunting dan meningkatkan gizi pada anak.
		b. Kejelasan Tujuan Program	
2.	2) Sumber Daya	a. Kemampuan Implementor	Kemampuan implementor sudah bagus, namun implementasinya baru dilakukan secara prioritas. Kemudian untuk kesediaan dana berasal dari komunitas IPKB, perusahaan, masyarakat yang mampu, dan sebagian gaji dari pegawai instansi-instansi terkait. Serta untuk sarana dan prasarananya hanya ada di Kecamatan Rancakalong dan Tanjungmedar yang masih memungkinkan, sisanya berupa data dan bantuan pangan.
		b. Kesiediaan Dana	
		c. Kesiediaan Sarana dan Prasarana	
3.	1) Karakteristik Agen Pelaksana	a. Konsistensi Dalam Pelaksanaan Kebijakan	Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakannya belum stabil, karena tergantung pimpinan yang mengarahkan dan sampai sekarang belum ada lagi perintah. Kemudian untuk komitmen dalam pelaksanaan kebijakannya masih kurang untuk program BAAS.
		b. Komitmen Dalam Pelaksanaan Kebijakan	
4.	2) Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana	a. Responsif Terhadap Kelompok Sasaran	Responsif terhadap kelompok sasaran dari masyarakatnya baik, hanya saja ada yang menerima dan tidak, untuk lingkungannya belum begitu. Untuk transparansi dalam pelaksanaan kebijakannya cukup terbuka, di lihat dari segi dana maupun laporan tertulis.
		b. Transparan Dalam Pelaksanaan Kebijakan	
5.	3) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	a. Intensitas Komunikasi	Intensitas komunikasinya berjalan, karena untuk pelaporan, namun ada beberapa yang tidak dikelola tetapi langsung dari donatur kepada sasarannya. Untuk metode komunikasi yang digunakan ialah melalui laporan-laporan, rapat koordinasi, sosialisasi, zoom, maupun secara langsung.
		b. Metode Komunikasi Yang Digunakan	
6.	4) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	a. Kelompok Petugas Pelaksana	Untuk kelompok petugas pelaksanaanya di Kabupaten Sumedang, penanganan stunting melibatkan kolaborasi antar sektor ekonomi, sosial, dan politik. Ekonomi didukung oleh CSR, sementara
		b. Kelompok Sasaran Pelaksana Kebijakan	

			edukasi dilakukan oleh tenaga penyuluh. Komunikasi antar pemerintah, termasuk DPRD, berjalan baik dan fokus pada penurunan stunting melalui program yang terkoordinasi. Kemudian untuk kelompok sasaran pelaksana kebijakannya sudah optimal dalam pengimplementasiannya, namun hasilnya belum optimal, alur mekanismenya tidak konsisten, dan dalam pengkoordinasian bantuan tidak tepat sasaran.
--	--	--	--

Sumber: Hasil wawancara di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, UPTD Dalduk Kecamatan Ganeas, dan UPTD Dalduk Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, 2025

Berdasarkan tabel di atas dalam Implementasi Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sumedang bahwa secara keseluruhan implementasi program BAAS tersebut sudah dilakukan dengan baik pelaksanaannya akan tetapi masih terdapat aspek yang belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sebagai berikut:

Pertama dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, untuk kejelasan ukuran program sudah dilaksanakan, namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Selain itu, untuk indikator tujuan kebijakannya sudah cukup baik ialah menurunkan angka stunting di Kabupaten Sumedang. Hal ini sejalan dengan pendapat Agustino (Sahupala, 2020: 154) menjelaskan bahwa “Untuk mengukur kinerja pelaksanaan kebijakan pastinya memperjelaskan standar serta tujuan khusus yang mesti diperoleh oleh para penyelenggara kebijakan, kinerja kebijakan pada umumnya menggambarkan penilaian terhadap tingkat ketercapaian standar serta sasaran itu”. Adapun menurut Van Meter dan Van Horn (Purnamasari & Pradana, 2017: 66) menjelaskan bahwa “Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan”.

Kedua, dimensi sumber daya terlihat belum cukup baik. Hal tersebut dilihat dari indikator kesediaan dana, karena sumber anggaran untuk program BAAS ini hanya mengandalkan anggaran yang dikumpulkan oleh komunitas Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPKB), dan terkadang sisihan gaji para pegawai. Selain itu untuk sarana dan prasarana juga hanya terdapat di beberapa kecamatan saja yang masih memadai. Untuk kemampuan implementor sudah cukup baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Kenis (Octariani dkk, 2017: 30) menjelaskan bahwa “Anggaran tidak hanya sebagai perencanaan keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, tetapi juga merupakan alat bagi atasan tingkat atas untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kinerja”.

Selanjutnya menurut Sutisna & Effane (2022: 228) menyatakan bahwa, “Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya”.

Ketiga, dimensi karakteristik agen pelaksana terlihat belum cukup baik. Hal tersebut dilihat dari indikator komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakannya terhadap program BAAS ini belum stabil, karena tergantung arahan dari pimpinan dan sampai sekarang belum ada lagi langkah lanjutan. Hal ini berpotensi menghambat upaya penanganan stunting yang membutuhkan keinginan dan sinergi antara berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait. Hal ini sejalan dengan pendapat menurut Van meter dan Van Horn (Sasuwuk dkk, 2021: 85) mengemukakan bahwa “Karakteristik agen/badan-badan pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan salah satu aspek yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan itu tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi”.

Adapun menurut Aktami (Zulkarnain & Hadiyani, 2014: 20) menjelaskan bahwa “Komitmen organisasi merupakan salah satu kunci penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya”.

Keempat, dimensi sikap atau kecenderungan para pelaksana terlihat sudah baik. Hal tersebut dilihat dari indikator responsif terhadap kelompok sasaran, bahwa respon dari masyarakatnya sangat baik, namun untuk lingkungannya belum begitu. Selain itu dari transparansi dalam pelaksanaan kebijakannya cukup terbuka, di lihat dari segi dana yang kebetulan anggarannya dari komunitas sehingga terbuka untuk semua, serta dari gaji setiap pegawai yang menyisihkan uangnya untuk program BAAS sebesar Rp. 50.000/bulannya, dan laporan

setiap pemasukan dari anggota dilaporkan setiap pertemuan di satu bulan sekali. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdullah Wahid & Yuyun Sefri Setyaningrum (Mening Subekti dkk, 2017: 67) menjelaskan bahwa “Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan akan berjalan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan”. Adapun Lalolo (Sangki dkk, 2017: 3) menjelaskan bahwa “Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai”.

Kelima, dimensi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana sudah cukup baik akan tetapi belum optimal. Hal itu terlihat dari aspek intensitas komunikasinya, sudah berjalan namun ada beberapa hal dalam pelaporannya yang tidak dikelola tetapi langsung dari donatur kepada sasarannya. Untuk metode komunikasi sudah baik karena banyak solusi untuk digunakan dalam berkomunikasi seperti melalui laporan, rapat koordinasi, sosialisasi, *zoom*, maupun secara langsung. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Zahara (2018: 6) menjelaskan bahwa “Komunikasi dalam sebuah organisasi merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan tujuan yang akan diraih oleh suatu organisasi”. Adapun Barnard (Asriadi, 2020:36) menyatakan bahwa “Komunikasi merupakan kekuatan utama dalam membentuk organisasi dan komunikasi yang membuat dinamis suatu sistem kerjasama dalam organisasi dan menghubungkan tujuan organisasi pada partisipasi orang di dalamnya”.

Keenam, dimensi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sudah cukup baik akan tetapi belum optimal. Hal itu terlihat dari indikator kelompok sasaran pelaksana kebijakan, bahwa dalam pengimplementasiannya sudah optimal namun hasilnya belum optimal, karena ada beberapa alur mekanismenya yang belum konsisten, serta dalam pengkoordinasian bantuannya tidak tepat sasaran. Selain itu untuk indikator kelompok petugas pelaksana sudah baik. Hal itu terlihat dari penanganan stunting di Kabupaten Sumedang yang melibatkan kolaborasi antar sektor ekonomi yang didukung oleh CSR, serta komunikasi yang terjalin dengan baik antar pemerintah, termasuk DPRD yang berfokus pada penurunan stunting melalui program yang terkoordinasi. Sejalan dengan pendapat Bakry & Juliastuti (Desrinalti dkk, 2021: 84) menjelaskan bahwa “Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya semata dilaksanakan oleh lembaga administrasi yang telah ditetapkan. Namun juga pelaksanaan kebijakan publik juga ditentukan oleh keterlibatan masyarakat berupa kekuatan sosial, ekonomi, dan politik serta keterlibatan berbagai pihak.”.

Adapun menurut Sahupala (2020: 158) menjelaskan bahwa “Yang harus dilihat supaya bisa menilai kinerja pelaksanaan kebijakan ialah sejauh mana lingkungan luar ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik”.

4. CONCLUSION

Implementasi Program Bapak Asuh Anak Stuning (BAAS) Dalam Upaya Percepatan Stunting di Kabupaten Sumedang ini secara keseluruhan sudah dilakukan dengan cukup baik, namun terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Aspek yang sudah cukup baik ada pada dimensi ukuran dan tujuan kebijakan dimana tujuan kebijakannya sudah sesuai dengan peraturan, namun untuk capaian dan partisipasinya perlu ditingkatkan lagi karena belum mencapai target yang optimal. Lalu dari dimensi sumber daya untuk kemampuan implementor sudah cukup baik, namun dari segi finansial dan sarana prasarannya perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya dari dimensi karakteristik agen pelaksana masih perlu ditingkatkan lagi, dari aspek konsistensi dan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan. Kemudian, dari dimensi sikap atau kecenderungan para pelaksana menjadi aspek yang sudah baik dari responsif dan transparan dalam pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana sudah cukup baik namun dari intensitas komunikasi perlu ditingkatkan lagi. Terakhir, dimensi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi dari aspek kelompok sasaran pelaksana kebijakannya.

Faktor penghambat implementasi Program Bapak Asuh Anak Stuning (BAAS) Dalam Upaya Percepatan Stunting di Kabupaten Sumedang, yaitu dari dimensi faktor eksternal yaitu dari lingkungan masyarakatnya terkait program BAAS terlihat pada responsibilitinya yang kurang, ada yang menolak program, dan ada yang terus mengandalkan bantuan tanpa ada perubahan dari perilakunya, dan perlunya pendampingan selama proses berlangsung. Selanjutnya, dimensi faktor internal hambatannya yaitu dari tata kelola organisasinya belum optimal, tidak ada koordinasi antara donatur dengan penerima bantuan, dan terkait sinkronisasi data yang belum maksimal, untuk kualitas pegawai hambatannya ialah di sumber daya untuk ahli nutrisi tidak banyak dan terkadang para petugas tidak ada kemauan untuk melaporkan dan menggerakkan, untuk kuantitas pegawainya jumlah petugasnya sedikit, dan untuk monitoring serta evaluasi terkait pelaporannya ada yang masih telat, monitoringnya tidak dilakukan secara periodik, dan tidak ada perubahan untuk tinggi badan padahal bantuan sudah maksimal.

Upaya dalam mengatasi hambatan Implementasi Program Bapak Asuh Anak Stuning (BAAS) Dalam Upaya Percepatan Stunting di Kabupaten Sumedang, yaitu dari dimensi faktor eksternal yaitu dengan memberikan edukasi atau pun informasi secara terus menerus kepada masyarakat mengenai stunting. Dan harus

ada tim pendamping, agar memastikan bantuan tepat sasaran, serta juga diperlukannya edukasi. Kemudian, dimensi faktor internal yaitu dengan memperkuat atau meningkatkan koordinasi antara instansi-instansi, diperlukan pelibatan dari masyarakat, selain itu, melakukan komunikasi dan advokasi bersama pimpinan, serta lebih memaksimalkan peran dan fungsi Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta harus merekrut pegawai baru dan memaksimalkan kinerja pegawai yang sudah ada agar beban kerja dapat diminimalisir, kemudian upaya untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui pelaporan rutin, penggunaan forum komunikasi *online*, serta pembentukan tim khusus yang fokus pada penguatan sistem informasi dan data terkait stunting untuk memantau perkembangan anak secara efektif.

REFERENCES

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Asriadi. (2020). Komunikasi Efektif Dalam Organisasi. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 36-50.
- Desrinelti, Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 83-88.
- Octariani, D., Akram, & Animah. (2017). Anggaran Berbasis Kinerja, Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran SKPD (Suatu Pengujian Struktural). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 27-41.
- Purnamasari, H., & Pradana, B. A. (2017). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi. *Jurnal politikom indonesiana*, 62-78.
- Sahupala, M. I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 152-160.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*.
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kecamatan Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 78-89.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektivitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. *Journal of Public Administration*, 58-71.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutisna, N. W., & Effane, A. (2022). Fungsi Manajemen Sarana dan Prasarana. *Jurnal Karimah Tauhid*, 226-233.
- Zahara, E. (2018). Peranan Komunikasi Organisasi Bagi Pimpinan Organisasi. *Jurnal Warta*, 1-6.
- Zulkarnain, & Hadiyani, S. (2014). Peranan Komitmen Organisasi dan Employee Engagement terhadap Kesiapan Karyawan untuk Berubah. *Jurnal Psikologi*, 17-33.